



Modernisasi dan Enkulturasasi Budaya dalam Pendidikan Islam

Ramandha Rudwi Hantoro^{1*}, Rosnawati Rosnawati², Saripuddin Saripuddin³, Milasari Milasari⁴, Lias Hasibuan⁵, Kasful Anwar Us⁶

¹)Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: ramandharudwi@gmail.com

²)Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: zahra_algiffari66@yahoo.com

³)Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: syarifsaripuddin417@gmail.com

⁴)Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: milasari1810@yahoo.co.id

⁵)Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: lhas10@yahoo.co.id

⁶)Dosen Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, email: kasfulanwarus@gmail.com

*Corresponding Author: Ramandha Rudwi Hantoro¹

Abstrak: Globalization forces Islamic education as a system to continue to develop and adapt to the times, as well as proof that Islam has the principle of "Shólihun fí kulli zamánin wa makánin wa ummah". Therefore, the modernization and enculturation of Islamic education culture is an interesting issue to discuss. In this article, we will discuss theoretically using qualitative methods through library research on the modernization and enculturation of Islamic education culture in Indonesia. Critically, based on the data obtained in the form of qualitative data from various reading sources, books, articles, research, scientific publications and manuscripts for analysis. The results of the discussion show that Islamic education in Indonesia has experienced a clash of two paradigms, namely on the one hand it is affected by weterнизation and on the other hand it is affected by Arabization. With these two paradigms of view, Indonesian Islamic education creates its own Islamic "culture" that carries Indonesianness by internalizing Islamic values but at the same time has Middle-Eastern cultural values as the source of Islam itself and Western culture as the center of modernism.

Kata Kunci: Modernization, Enculturation, Islamic Education

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam saat ini memiliki tantangan besar dalam menghadapi perubahan zaman yang akan datang. Konsep pendidikan masa datang adalah keterpaduan antara

khazanah keilmuan modern dan khazanah Islam yang bernuansa budaya lokal. Sementara itu, kondisi obyektif pendidikan Indonesia adalah sebuah potret dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan Islam tradisional diwakili pesantren yang bersifat konservatif dan "hampir" steril dari ilmu-ilmu modern. Sedangkan pendidikan modern diwakili oleh lembaga pendidikan umum yang disebut sebagai "warisan kolonial" serta madrasah-madrasah yang dalam perkembangannya telah berafiliasi dengan sistem pendidikan umum (Malik Fadjar, 1998: 6).

Dari kedua lembaga pendidikan tersebut, pesantren adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan lahir dari kultur Indonesia yang bersifat indigenous. Lembaga inilah yang dilirik kembali sebagai model dasar pengembangan konsep pendidikan (baru) Indonesia. Tetapi, realitas yang terdapat dalam lembaga ini memunculkan sikap kekecewaan.

Dalam perspektif historis terlihat, ketika pemerintah kolonial memperkenalkan pendidikan modern, kalangan pesantren menyikapinya dengan resistansi yang kuat terhadap kebijakan pemerintah kolonial tersebut, bahkan menempuh politik non-kooperatif dengan Belanda, serta isolative (Azra, 2004). Padahal pemerintah kolonial dengan segala "iktikad baik"-nya ingin menyertakan rakyat "Hindia Belanda" dalam peradaban modern tersebut. Para ulama justru mengimbanginya dengan mengembangkan dan mendirikan lebih banyak pesantren-pesantren (Majid, 2005: 4), yang terasing atau mengasingkan diri dengan lingkungan waktu itu.

Seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikan akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren tersebut. Seperti pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat, di mana hampir semua universitas terkenal cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi keagamaan (Majid, 2005).

Di sisi lain, sekitar tahun 1900 sampai pertengahan abad ke-20, kompromi dengan sistem pendidikan modern diperlihatkan oleh madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan di Minangkabau dan Jawa. Pembaharuan dalam lembaga pendidikan tersebut dibawa oleh tokoh-tokoh, seperti Haji Rasul, Abdullah Ahmad, K.H. Ahmad Dahlan, dan lain-lain dengan mengadopsi corak pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh di Mesir.

Muhammad Abduh ketika itu melihat dualisme dalam sistem pendidikan di Mesir, di satu pihak menganut sistem pendidikan Barat, di pihak lain menggunakan pendidikan Islam tradisional. Menyikapi kondisi ini, Muhammad Abduh berusaha untuk mensintesakan dualisme pendidikan itu dengan jalan merumuskan kembali tujuan dan sistem pendidikan. Pola ini kemudian dicontoh dan dikembangkan di Minangkabau dan Jawa (Steenbrink, 1994).

Gerakan pembaharuan ini sangat berpengaruh dan berhasil untuk ukuran waktu itu. Tetapi, tokoh pembaharu yang datang kemudian melihat kelemahan-kelemahan pada gerakan pembaharuan di atas, lembaga pendidikan dalam bentuk ini dianggap tidak relevan lagi, sebab hanya berdampak pada "pemiskinan intelektual" karena meninggalkan khazanah kitab-kitab Islam klasik.

Perubahan yang dibawa oleh para cendekiawan muslim itulah membawa proses perubahan pada sosial budaya masyarakat sekitar. Muncullah proses pembudayaan modern yang terjadi melalui lembaga-lembaga pendidikan terhadap para santri yang belajar di lembaga pendidikan Islam yang mereka dirikan. Dengan latar belakang inilah, penulis mencoba mengangkat kembali tema modernisasi dan problematika pendidikan Islam kaitannya dengan proses pembudayaan dan perubahan sosial masyarakat.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

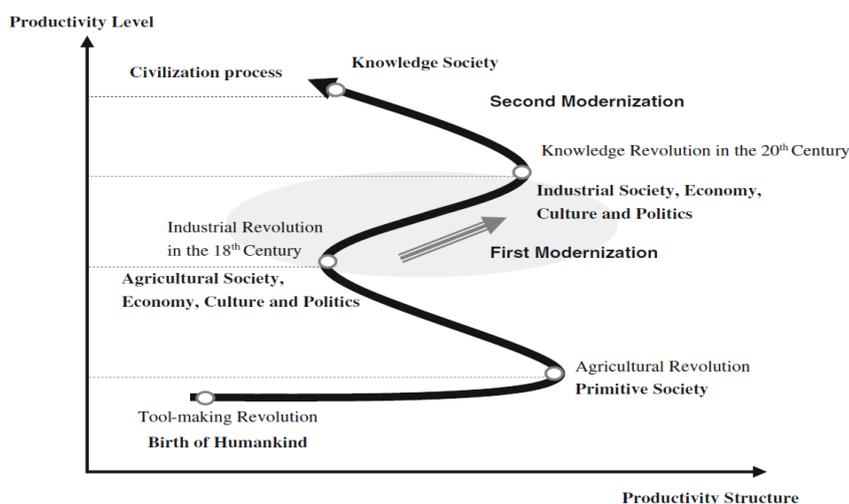
- 1) Bagaimana Modernisasi dan Enkulturasinya pendidikan Islam di Indonesia?

- 2) Bagaimana proses Enkulturası pendidikan Islam di Indonesia?
- 3) Bagaimana Problematika Modernisasi dan Enkulturası pendidikan Islam di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Kapan sebenarnya sebuah periode disebut sebagai “zaman modern”? Istilah “modern” memiliki arti sekarang, saat ini atau baru merupakan serapan dari bahasa latin “*moderna*” dari Bahasa Jerman. Berangkat dari arti bahasa maka sebenarnya setiap kita hidup di zaman modern, selama ada kesadaran dalam memaknai kekinian. Disisi lain, modernitas merujuk pada kesadaran manusia terkait dengan “kebaruan” (*newness*). Maka dari itu, kata-kata seperti kemajuan, revolusi, perubahan dan sejenisnya biasanya sering digunakan dalam membahas yang terkait dengan modernitas (Hardiman, 2004).

Teori modernisasi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama (1950-an dan 1960-an), fase kedua (1970-an dan 1980-an), fase ketiga (1990-an) (Gwynne, 2009). Teori modernisasi lahir sebagai sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia dimana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia (Afrika dan Amerika Latin). Terdapat dua teori yang melatarbelakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme (Suwarsono, 1991). Secara visual proses modernisasi dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. Proses Modernisasi

Ada banyak versi yang berbeda dari teori modernisasi. Bagian ini akan membahas perbedaan pandangan antara versi Marxis dan kapitalis, versi Barat, dan teori modernisasi versi masa kini. Modernisasi itu sendiri berasal dari modern sebagai root yang memiliki akhiran -isation yang menunjukkan suatu proses. Modernisasi diserap dari bahasa Inggris dari kata modernization (nomina) dan memodernisasi (verba) yang artinya kontemporer (Echols & Shadily, 2005: 384).

Dari istilah modern, muncul istilah-istilah lain, seperti modernisme, modernitas dan modernisasi, meskipun pengertiannya berbeda, tetapi karena masih dalam akar yang sama, maka pengertiannya yang dikandungnya tidak terlepas dari akar kata yang dikandungnya (Sholihan, 2008: 56) Harun Nasution menyatakan dalam bukunya Pembaharuan Dalam Islam, bahwa modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti sebagai pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 2003: 36). Dapat dipahami bahwa arti modernisasi adalah usaha untuk mengubah sesuatu yang dianggap lama, usang dan diganti

dengan sesuatu yang dianggap baru. Baru dalam arti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru.

Meskipun modernisasi berawal dari dunia Barat, tetapi modernisasi bukan hak mutlak dunia Barat. Modernisasi milik semua bangsa yang ingin kemajuan, ingin perubahan ke arah lebah baik. Termasuk dunia Islam. Islam tidak menolak modernisasi, bahkan ajaran Islam memberi peluang kepada umatnya untuk selalu melakukan pembaharuan.

Menurut Deliar Noor, modernisasi menuntut bangsa Indonesia untuk, pertama; memandang ke depan dan bukan menandang ke belakang. Kedua, memiliki sikap dinamis dan aktif, bukan sikap menunggu. Ketiga, memperhatikan waktu. Keempat, memberikan penekanan pada rasionalitas dan bukan pada perasaan atau perkiraan. Kelima, mengembangkan sikap terbuka terhadap berbagai pemikiran dan produk yang memiliki signifikansi ilmiah. Keenam, memberikan prioritas terhadap prestasi personal, dan bukan status yang diperoleh. Ketujuh, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini, yang bersifat konkret dan lebih bersifat duniawi. Kedelapan, melibatkan diri dalam pengejaran tujuan yang lebih penting dari tujuan kelompok (Sholihan, 2008: 60).

Persoalan modernisasi identik dengan rasionalisasi. Hal ini mengandung arti sebuah proses perubahan atau perombakan pola pikir tata kerja yang tidak rasional (Majid, 1998: 76). Dari pendapat Nurcholish Madjid tersebut dapat dipahami bahwa modernisasi terkait erat dengan rasionalitas. Melibatkan sebuah proses peralihan dari pola pikir yang tidak rasional menuju pola pikir rasional. Dapat diartikan sebagai sebuah proses peralihan pola pikir lama yang usang menuju pola pikir baru yang terkini dan sesuai dengan jamannya.

Nurcholish Madjid mengungkap dalam bukunya *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, bahwa modernisasi adalah suatu keharusan, bahkan suatu kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Allah. Hal ini didukung oleh Argumen berikut: *Pertama*, Allah menciptakan seluruh alam ini dengan benar bukan palsu. *Kedua*, Dia mengatur dengan peraturan *Ilahi/sunatullah* yang menguasai dan pasti. *Ketiga*, sebagai buatan Tuhan Maha Pencipta, alam ini adalah baik, menyenangkan (mendatangkan kebahagiaan duniawi) dan harmonis. *Keempat*, manusia diperintah oleh Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum yang ada dalam ciptaan-Nya. *Kelima*, Allah menciptakan seluruh alam raya untuk kepentingan manusia, kesejahteraan hidup dan kebahagiaannya, sebagai rahmat dari-Nya. *Keenam*, karena adanya perintah untuk mempergunakan akal pikiran/rasio itu, maka Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, terutama pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berfikir dan kerja generasi sebelumnya (Majid, 1998: 76).

Modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan atau perubahan dan perombakan secara asasi atas susunan dan corak suatu masyarakat. Seperti dari statis menuju dinamis, dari tradisional ke rasional dari feodal ke kerakyatan, dan lain sebagainya. Kesemua itu dilakukan dengan jalan mengubah cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi segala aparat dan alat cara semaksimal mungkin (Anshari, 2004: 135).

Dapat dipahami bahwa modernisasi selalu terkait dengan sikap rasional, sikap ingin maju dan bersifat positif, terutama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan pencapaian tujuan manusia. Modernisasi terkait dengan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan watak tradisional menuju modern. Hal ini senada diungkapkan oleh Rohadi Abdul Fattah dan Sudarsono, bahwa modernisasi adalah suatu perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan watak yang tadinya bersifat tradisional, ke arah pemikiran, sikap dan watak yang bersifat maju (Takdir, 2018: 84).

Kemajuan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang karena adanya pemikiran rasional. Pemikiran rasional berkembang akibat adanya

keinginan untuk maju. Dan maju itu sendiri adalah buah dari sikap, watak rasional dari pemikiran manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, tidak hanya di dunia barat, tetapi dunia Islam pun merasakan bahwa kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk menyikapi kemajuan tersebut, dunia Islam tergerak untuk melakukan gerakan dan penyesuaian paham-paham keagamaan dengan perkembangan baru yang timbul akibat kemajuan ilmu dan teknologi modern. Kaum terpelajar Islam kata modernisasi diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipakai dalam Islam seperti *attajdid* dalam bahasa Arab, dan pembaharuan dalam bahasa Indonesia. Bagi sebagian kalangan ilmuwan Islam kata modernisasi dianggap mengandung arti negatif, sehingga untuk menjauhkan arti tersebut, maka dipakailah terjemahan Indonesianya dengan pembaharuan (Nasution, 2003: 40).

Budaya dan Pembudayaan

Hal yang penting untuk dibahas kaitannya dengan proses pembudayaan pendidikan Islam, maka perlu diterangkan terlebih dahulu arti pembudayaan agar dalam membahas proses pembudayaan akan lebih terarah. Menurut KBBI, pembudayaan berasal dari kata budaya /bu·da·ya/ n 1 pikiran; akal budi: hasil --; 2 adat istiadat: menyelidiki bahasa dan --; 3 sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang --; 4 cak sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah; Pembudayaan/pem·bu·da·ya·an/ n 1 proses, cara, perbuatan membudayakan; 2 Antr proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap (Kemdikbud, 2021).

Term “Budaya” sebenarnya kata yang familiar dapat kita pahami maksud dan artinya, tapi benarkah apa yang kita pahami betul-betul bermakna sebagaimana arti original dari “budaya” itu sendiri. Secara umum makna budaya dipahami oleh masyarakat merupakan suatu adat, kebiasaan, dalam bentuk tutur kata, perilaku, tindakan yang ajarkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka dan dipelihara oleh generasi berikutnya. Kata “budaya” merujuk pada kata “budhi” dalam bentuk tunggal atau “budhaya” dalam bentuk jamak, sebuah kata serapan dari Bahasa sanksekerta yang memiliki arti akal (Ahmadi, 2004; Widosiswoyo, 2009; Meinarno, 2011). Dalam KBBI “Budaya” memiliki arti kata sebagai “pikiran, akal budi, dan adat istiadat” atau juga diartikan sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk diubah. Sementara, “budaya” dalam Bahasa latin disebut “colere” memiliki arti “mengolah” atau “mengerjakan sesuatu” (Koentjaraningrat, 2009). Dalam bahasa Inggris sendiri kata budaya sama dengan kata “culture”, memiliki arti hasil capaian manusia dalam bentuk adat istiadat, pemikiran, karya, prestasi apapun itu oleh individu, kelompok sosial atau bangsa.

Secara definisi budaya menurut Koentjaraningrat, merupakan “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar” (Koentjaraningrat, 2009). Koentjaraningrat berpendapat bahwa budaya itu adalah hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Hasil karya manusia itu bisa berupa pemikiran, perilaku atau aktivitas, dan produk. Oleh karena itu, budaya dalam kerangka pikir Koentjaraningrat sangat umum karena mencakup pemikiran seperti ide gagasan kebijakan, norma, peraturan dan sejinisnya; bisa juga berupa aktivitas seperti kegiatan ritual keagamaan, adat istiadat, dan semacamnya; bisa juga dalam bentuk suatu hasil karya yang dapat dilihat secara empiris, seperti peralatan pertaanian, gedung-gedung, relief, candi, alat-alat keseharian dan sebagainya.

Stephanie Pappas dan Callum McKelvie, berpendapat bahwa budaya itu adalah karakteristik dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang meliputi kebiasaan masyarakat, agama, musik, seni, bahasa dan seluruh yang menyangkut keseharian masyarakat termasuk dalam hal makanan (Pappas, 2021). Sedikit berbeda dengan pandangan Koentjaraningrat, Banks, J.A., Banks, & McGee, C. A. (1989) mengatakan bahwa “Sebagian besar ilmuwan sosial saat ini memandang budaya terutama terdiri dari aspek simbolik,

ideasional, dan tidak berwujud dari masyarakat manusia. Esensi suatu budaya bukanlah artefak, alat, atau elemen budaya berwujud lainnya, tetapi bagaimana anggota kelompok menafsirkan, menggunakan, dan memahaminya. Ini adalah nilai, simbol, interpretasi, dan perspektif yang membedakan satu orang dari orang lain dalam masyarakat modern; itu bukan objek material dan aspek nyata lainnya dari masyarakat manusia. Orang-orang dalam suatu budaya biasanya menafsirkan makna simbol, artefak, dan perilaku dengan cara yang sama atau serupa.”

Damen (1987), memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang budaya, dia menjelaskan bahwa budaya merupakan “pola atau model kehidupan manusia yang dipelajari dan dibagikan; pola hidup sehari-hari. pola dan model ini meliputi semua aspek interaksi sosial manusia. Budaya adalah mekanisme adaptif utama umat manusia”. Intinya bahwa hasil dari apa yang dipelajari manusia akan menjadi sebuah budaya jika disebarkan dan diajarkan kepada orang lain. Pola ini akan menjadikan masyarakat tersebut memiliki satu pandangan akan hidup dan mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal (Damen, 1987).

Berdasarkan beberapa definisi tentang budaya yang telah diuraikan di atas, dapat kita buat sebuah sintesa bahwa budaya merupakan pola perilaku dan interaksi bersama, konstruksi kognitif dan pemahaman yang dipelajari melalui sosialisasi. Dengan demikian, budaya dapat dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok yang dipupuk oleh pola-pola sosial yang unik bagi kelompok tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa budaya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia privat ataupun publik, sederhana atau rumit, baik itu agama, rumah tangga, bahasa, pernikahan, makanan, cara bergaul, keyakinan tentang benar dan salah, dan masih banyak lagi.

Setelah mengetahui maksud dari budaya, maka selanjutnya perlu kita berdiskusi tentang makna pembudayaan. Enkulturasasi atau pembudayaan adalah proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Pengertian ini sekilas mirip dengan sosialisasi, dimana sosialisasi dalam ilmu antropologi diartikan sebagai suatu proses bagi seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya. Keduanya oleh M.J. Herskovits dibedakan pada aspek penerimaan oleh anak. Jika enkulturasasi dipelajari oleh seorang anak baik sadar maupun tidak sedangkan sosialisasi lebih kearah pembiasaan yang diterima anak dalam masyarakat sehingga mengerti tentang norma-norma yang berlaku (Koenjcaraningrat, 2000; Septiarti dkk, 2017: 78-79).

Enkulturasasi berasal dari aspek-aspek dari pengalaman belajar yang memberi ciri khusus atau yang membedakan manusia dari makhluk lain dengan menggunakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Proses enkulturasasi bersifat kompleks dan berlangsung sepanjang hidup, tetapi proses tersebut berbeda-beda pada berbagai tahap dalam lingkaran kehidupan seseorang. Enkulturasasi terjadi secara agak dipaksakan selama awal masa kanak-kanak tetapi ketika mereka bertambah dewasa akan belajar secara lebih sadar untuk menerima atau menolak nilai-nilai atau anjuran-anjuran dari masyarakatnya. Enkulturasasi dan sosialisasi tampak berbeda-beda tetapi juga sama. Meskipun caranya berbeda, tujuannya sama, yaitu membentuk seorang manusia menjadi dewasa. Proses sosialisasi seorang individu berlangsung sejak kecil. Mula-mula mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dalam lingkungan terkecil (keluarga), kemudian dengan teman-teman sebaya atau sepermainan yang bertetangga dekat, dengan saudara sepupu, sekerabat, dan akhirnya dengan masyarakat luas.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai sintesis bahwa pembudayaan merupakan proses penanaman nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu/nenek moyang baik secara tidak sadar atau sadar dengan mempelajari seluruh

kebudayaan yang dimiliki masyarakat tersebut. Oleh karena itu, enkulturasi atau pembudayaan nilai-nilai diwariskan melalui jalur pendidikan baik formal atau informal.

Modernisasi Pendidikan Islam

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana hubungan antara modernisasi dan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu variabel modernisasi. Dalam konteks ini, pendidikan adalah dianggap sebagai persyaratan bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan modernisasi. Tanpa pendidikan yang memadai, akan sulit bagi komunitas mana pun untuk membuat kemajuan. Tetapi di sisi lain, pendidikan sering dianggap sebagai objek modernisasi (Syah, 2016: 83; Ashraf, 1985: 4).

Melihat kompleksnya kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks kehidupan, setidaknya pendidikan Islam harus melakukan pembaharuan paradigma. Ini Pergeseran paradigma diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pendidikan Islam tetap bertahan dan tetap menjadi masyarakat ideal. Lebih jauh, Paradigma reformasi pendidikan Islam belakangan ini telah mengarah pada reformasi. Oleh karena itu, sebuah konstruk reformasi pendidikan Islam secara konseptual dapat diterima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya nasional, dan dapat diterima secara politik oleh masyarakat. Modernisasi bukanlah kosa kata yang terdengar asing di telinga kita, seperti modernisasi dan modernisasi sangat sering hadir dalam berbagai tulisan, ilmiah dan populer.

Modernisasi itu sendiri adalah buah dari kebangkitan XVI gerakan di Eropa, yang berlanjut dengan rasionalisme dan memuncak dalam sekularisme, materialisme dan ateisme di abad kesembilan belas dan kedua puluh abad. Modernisasi dimulai sebagai upaya untuk melepaskan diri dari transendensi, yang dikemas dengan bingkai filsafat atau agama. Perhatian utama modernisasi adalah masalah kontemporer Makna modernisasi yang lebih dekat dikemukakan oleh Soedjatmoko di Gazalba yang menyebut modernisasi sebagai proses peningkatan kapasitas suatu sistem sosial untuk mengatasi tantangan dan masalah baru yang dihadapi oleh menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya lainnya (Gazalba, 1973: 5). Jika demikian, maka modernisasi pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan Islam untuk menjawab tantangan tersebut yang datang dari berbagai arah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah 'meningkatkan kemampuan' di sini bisa berarti meningkatkan keislaman sistem pendidikan yang dianggap tertinggal oleh konsep baru yang lebih relevan dengan dinamika zaman.

Kebutuhan akan pemahaman baru ini muncul sebagai konsekuensinya perkembangan peradaban dunia pada umumnya dan Islam peradaban pada khususnya. Sejak keberhasilan generasi awal Muslim memperluas pengaruhnya di luar Hijaz, kemudian di luar Arab, Islam memang berevolusi dari dimensi ruang. Fenomena ini memberikan menimbulkan kontak dengan hal-hal yang sama sekali baru, mulai dari budaya, bahasa, adat dan bahkan agama. Saat ini, Islam hadir dan diakui di banyak bagian dunia dan karenanya telah dalam berbagai konteks ruang, bersama dengan segala variasinya. Selain itu, peradaban manusia memiliki juga mengalami berbagai perkembangan dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Peradaban modern (sebagai kelanjutan dari peradaban klasik) telah membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. keduanya Perangkat yang berperan dalam peradaban modern adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia dan kehidupan manusia. Perubahan menyentuh seluruh dunia dan mendiami kehidupan penduduknya, termasuk umat Islam (Asari, 2007: 2).

Secara historis, aspek modernitas pada lembaga pendidikan islam telah ada sebelum masa kemerdekaan, hal itu ditandainya pemikiran para tokoh-tokoh cendekiawan muslim dikawasan Timur Tengah. Walaupun demikian, modernisasi pendidikan Islam di Indonesia

harus diakui berasal dari Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia. Berdirinya sekolah dengan sistem modern oleh Belanda merupakan penerapan kebijakan politik etnis yang dilancarkan oleh Kolonial sehingga berdirilah sejak saat itu sekolah-sekolah negeri atau rakyat.

Ada beberapa aspek modernisasi pendidikan Islam sejak saat itu, yang kemudian berangsur sedikit demi sedikit diadaptasi oleh sekolah atau pesantren berbasis Islam. Beberapa aspek modernitas yang masuk dalam pendidikan Islam yaitu:

a. Sistem Pendidikan.

Masuknya modernisasi pada lembaga pendidikan mengubah sistem manajemen lembaga menjadi lebih tertata. Modernisasi sistem pendidikan Islam berfokus pada dua hal, aspek kurikulum dan metodologi. Modernisasi kurikulum pada lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan mensintesis kedua ilmu, yaitu: ilmu umum (sains) dan ilmu agama (syar'i). Sedangkan dari aspek metodologi, modernisasi dilakukan dengan menerapkan sistem penjenjangan (jenjang wustha dan 'ulya) dan menerapkan proses pengajaran modern (Masruroh & Umiarso, 2011: 119)

Dari segi metode pengajaran, lembaga pendidikan Islam tidak lagi bergaya klasikal menggunakan model sorogan atau bandongan, tetapi menerapkan teori-teori pengajaran modern, yaitu: metode active learning, sosio-drama, diskusi, dan sebagainya.

Dalam evaluasi hasil belajar, bahkan di pesantren telah menggunakan penilaian terintegrasi. Penilaian yang tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan kognitif siswa (yaitu hafalan) untuk menentukan naik atau tidaknya ke jenjang selanjutnya, akan tetapi menggabungkan seluruh potensi yang dimiliki santri dari aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif.

b. Manajemen Kelembagaan.

Modernisasi lembaga pada lembaga pendidikan Islam lebih terbuka. Artinya bahwa lembaga tersebut sangat menerima perubahan dan mengikuti kebutuhan zaman. Hal yang sangat terlihat dari modernisasi manajemen kelembagaan adalah aspek kepemimpinan dan manajemen (Azra, 1995: 104).

Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, merupakan gaya kepemimpinan kyai yang hanya mengikuti perintah dan arahan kyai. Pesantren yang memiliki gaya modern, lebih menerapkan kepemimpinan kolektif dimana setiap sub-bagian memiliki koordinator dan kyai sebagai pemimpin tertinggi hanya menjadi pengambil keputusan setelah adanya musyawarah bersama

c. Fungsional.

Modernisasi lembaga pendidikan Islam merubah fungsi lembaga secara signifikan, terutama pada pesantren. Pesantren yang memiliki fungsi awal sebagai kaderisasi ulama secara perlahan bergeser fungsinya merespon kebutuhan masyarakat (Malik, 2007: 5). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, bermunculan pesantren-pesantren yang memiliki fungsi lain sebagai respon terhadap perubahan zaman. Misalnya saja pesantren entrepreneurship, pesantren lansia, pesantren teknologi, dan sebagainya (Kemenag, 2020).

Pada akhirnya, modernisasi lembaga pendidikan mengarahkan kepada perubahan-perubahan yang dibutuhkan yang akan datang. Maka dalam kasus modernisasi lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah, selain memiliki fungsi tradisional tetapi juga menjadi agen perubahan yang siap merespon setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya (Malik, 2007: 12).

Pendapat Gus Dur, panggilan untuk K.H Abdurrahman Wahid, menegaskan bahwa pesantren pada hakikatnya adalah bersifat dinamis, inklusif (terbuka) pada perubahan, dan mampu menjadi penggerak perubahan yang diinginkan, peneliti mencoba mengembangkan statement tersebut pada 4 (empat) pilar pesantren, yakni pada sistem pendidikan pesantren, kurikulum pesantren, pola pembelajaran pesantren, dan sistem penyelenggaraan

pendidikannya. Bagaimanapun kondisi pesantren saat ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari atau pun dipungkiri. Di sadari atau tidak, ekspansi modernisasi berserta dengan semua agenda besarnya telah mengakibatkan berbagai dampak yang tak terkendali, membuat pesantren agak gelimpangan dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Menurut Abdul 'Ala pengadopsian sistem madrasa yang klasikal belum sepenuhnya dijalani oleh pesantren sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang dianutnya. Akibatnya, di satu sisi pesantren tergiring pada budaya pragmatis. Sedangkan, disisi lain pesantren belum mampu mengintegrasikan antar disiplin ilmu secara utuh dan interdependensi (Abul A'la, 2006: 20-21).

Proses integrasi yang agaknya tumpang tindih ini bersamaan dengan perkembangan sekolah-sekolah Barat yang mulai menjangkau sebagian bangsa Indonesia, pesantren pun mulai mengalami perkembangan yang bersifat kualitatif. Ide-ide pembaharuan pesantren mulai masuk ke Indonesia, serta dunia pendidikan Islam pada umumnya. Ide-ide pembaharuan dalam dunia Islam itu timbul sebagai akibat kemunduran umat Islam dan merajalelanya hegemoni Barat. Pada garis besarnya ide pembaharuan dalam bidang pendidikan yang berkembang di dunia Islam, bisa digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: **pertama**, Pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sistem pendidikan yang berlaku di Barat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan. **Kedua**, Pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada ajaran Islam yang murni. Mereka berpandangan bahwa sesungguhnya ajaran Islam sendiri merupakan sumber bagi perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan. Upaya ini diwujudkan dengan kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang tidak pernah membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. **Ketiga**, Gerakan pembaharuan yang berorientasi pada kekuatankekuatan dan latar belakang sejarah masing-masing. Dengan memperbaiki dan mengembangkan apa yang ada, dengan menghilangkan kelemahan-kelemahannya, serta memasukkan unsur-unsur baru (ilmu pengetahuan dan teknologi) diharapkan akan membawa kemajuan (Wahid, 2001).

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menekankan pada kualitas data yang berbentuk narasi dan data kualitatif. Sehingga dalam metode kualitatif lebih berfokus pada kedalaman informasi dan data suatu variabel daripada memperbanyak data numerik, tabel, dan statistik (Moleong, 2008; Satori & Komariah, 2013).

Penelitian kualitatif memiliki paradigma berpikir induktif dalam memecahkan sebuah masalah. Paradigma berpikir induktif berangkat dari permasalahan yang bersifat mikro dan dikembangkan kepada konteks makro (Cruz, 2013). Asumsi-asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif harus memiliki konsistensi. Maksudnya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada masalah bersifat induktif sehingga tidak mengarah kepada pertanyaan yang bersifat umum. Oleh karena itu sifat penelitian kualitatif adalah eksploratif (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

Objek penelitian ini mengambil modernisasi pendidikan Islam dan Enkulturasasi budaya. Data utama diambil melalui bacaan buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah. Yang dilakukan peneliti dari data-data yang didapat adalah menganalisa secara kritis melalui data yang diperoleh dan mengajukan pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu kekayaan literatur dalam penelitian ini sangat penting agar data kualitatif yang dibutuhkan untuk membangun pertanyaan dan menganalisa lebih mudah dan holistik.

PEMBAHASAN

Proses Pembudayaan Pendidikan Islam

Bagi M.J.Herskovits, pendidikan (education) adalah “directed learning” dan persekolahan (schooling) adalah “formalized learning”. Dalam literatur pendidikan dewasa ini dikenal istilah pendidikan formal, informal dan non-formal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang disusun secara hierarkis dan berjenjang secara kronologi mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas dan disamping pendidikan akademis umum termasuk pula bermacam-macam program dan lembaga untuk pendidikan kejuruan teknik dan profesional.

Sementara itu, P.M.Laksono dkk. dalam bukunya *Antropologi Pendidikan* (2015) mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi proses pewarisan pengetahuan dan reproduksi sosial dari suatu masyarakat yang melibatkan orang-orang dari generasi yang berbeda.

Gagasan “School Culture” atau budaya sekolah sebenarnya bukanlah hal baru di dunia pendidikan. Term ini awal digunakan oleh Willard Waller seorang sosiologi pendidikan pada tahun 1932 yang mengatakan bahwa “setiap sekolah memiliki budayanya sendiri dengan kebiasaan, tradisi, dan moral yang akan membentuk hubungan dan perilaku orang di dalamnya.” (Pajak, 2012; Waller, 1976). Peterson dan Deal (2016) dalam bukunya “*Shaping School Culture*” mengatakan bahwa budaya merupakan salah satu elemen dalam lingkungan sekolah yang sudah ada. Sekolah telah memiliki unsur pembentuk budaya, kita akan menemukan kebiasaan, guru dan staf yang saling berhubungan, dan ada nilai-nilai positif yang diterapkan dalam sekolah itu (Deal & Peterson, 2016, p. 8).

Oleh sebab itu, enkulturasi di sekolah merupakan sesuatu yang kompleks tentang kebiasaan, tradisi, dan suasana yang berkembang dari waktu ke waktu hasil dari hubungan antara guru, siswa, staf, dan orang tua wali dalam menangani krisis dan bersama-sama mencapai tujuan. Pola budaya yang bertahan lama, memiliki dampak yang kuat pada kinerja, mempengaruhi pendekatan untuk perbaikan sekolah, dan membentuk cara orang berpikir, bertindak, dan merasa (Fullan, 2011; Smylie, 2009; Tschannen-Moran, 2014). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budaya dapat mempengaruhi seluruh apa yang ada di dalam sekolah mulai dari cara berpikir, kebiasaan, prestasi, dan bentuk dari sekolah itu sendiri.

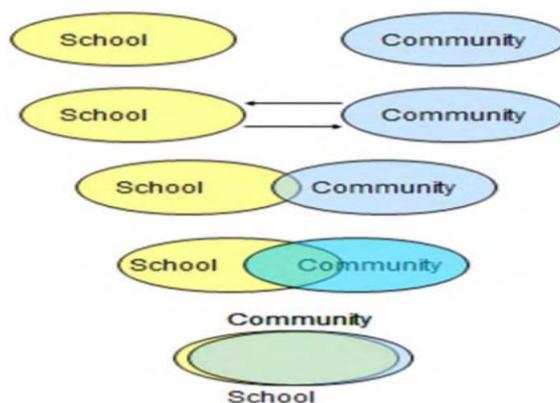
Sebagai hasil budaya, pendidikan memiliki relevansi dengan cara pandang masyarakat. Pengertian budaya sendiri menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Di Indonesia setiap anak yang sudah memasuki masa sekolah oleh orang tuanya di masukkan ke taman kanak-kanak maupun sekolah dasar (SD) jika usianya sudah 6 tahun selain itu pemerintah telah menggalangkan wajib belajar 9 tahun sehingga pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat, masyarakat yang tidak memasukan anaknya maka akan terkena sanksi dalam masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan budaya saling berkaitan. Pendidikan bertujuan membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan selain itu pendidikan dapat menaikkan status sosial seseorang di dalam masyarakat misalnya seorang yang telah bergelar sarjana mendapat status sosial yang lebih tinggi di masyarakat. Pada dasarnya, antropologi pendidikan mestilah merupakan sebuah kajian sistematis, tidak hanya mengenai praktik pendidikan dalam prespektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropolog terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan (Imran Manan, 1989). Jhon Dewey, seorang filsof menjelaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan

emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sementara itu Langeveld, mendidik adalah memengaruhi anak dalam membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan disengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Hal yang sama juga disampaikan Ki Hajar Dewantara kegiatan mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebudayaan. Seringkali masyarakat menganggap kebudayaan dalam arti yang sempit yaitu sebatas seni, tari-tarian atau tradisi saja. Sementara itu menurut para ahli kebudayaan bukan sekedar seni melainkan keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat melalui proses pendidikan. Gejala pemisahan antara kebudayaan dan pendidikan, dapat ditunjukkan dengan kebudayaan yang dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan seni, benda-benda purbakala seperti candi atau sastra seni tradisional; Nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan telah dibatasi pada nilai-nilai intelektual belaka; Nilai-nilai agama lebih bukan urusan pendidikan akan tetapi urusan lembaga agama. Konsekuensi gejala ini adalah menjadikan peserta didik hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat kecerdasan intelektual saja sehingga kecerdasan emosional, spiritual hingga soft skills lain yang penting dalam praksis pendidikan berkehidupan bermasyarakat menjadi terabaikan.

Sementara itu pendidikan dapat berlangsung melalui lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal atau juga melalui satuan pendidikan sejenis yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sesuai Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 butir 16 bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pasal ini membuktikan bahwa kebudayaan dalam pendidikan memiliki implikasi terhadap nilai-nilai demokratis, partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikannya. Banyak sekolah-sekolah, lembaga penyelenggara pendidikan (dan keterampilan) yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, misalnya sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, satuan pendidikan anak usia dini termasuk homeschooling. Terdapat transformasi nilai, sikap, kebiasaan selain keterampilan diselenggarakan di satuan-satuan pendidikan masyarakat tersebut selain lembaga pendidikan formal yang memiliki budaya sekolah yang berbeda namun setidaknya memiliki kesamaan yakni juga mengajarkan pendidikan moral, akhlak atau budi pekerti. Masyarakat yang menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi di dalam menanggung beban pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat, tentang pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka. Masyarakat dalam memilih pendidikan bagi anakanak didasari oleh kebutuhan, tujuan, filosofi pendidikan yang sesuai karakteristik anak didik. Orang tua yang menyekolahkan anak pada lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal tidak lepas dari nilai demokratis dan kepentingan pengembangan kepribadian dan moral yang saat ini dipandang sangat penting untuk dilakukan.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu paradigma pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam hal ini pemerintah daerah setempat untuk mengelola pembelajaran dan administrasi pendidikannya secara lebih luas. Penyelenggaran pendidikan berbasis sekolah juga merupakan salah satu implikasi diterapkannya konsep kebudayaan dalam pendidikan. Makna demokrasi adalah nilai yang menandakan diterapkannya nilai kebudayaan masyarakat termasuk didalamnya adalah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat diberi ruang yang lebih luas, transparan untuk terlibat dalam peningkatkan kualitas pendidikan. Paradigman keterlibatan masyarakat pada sekolah ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara sekolah dan masyarakat yang semula tidak mengarah pada aspek partisipasi yang kemudian mengalami perubahan yang menggambarkan antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan dalam konteks peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Masyarakat memiliki kewenangan pada aspek-aspek pengembangan nilai-nilai positif agar tidak terjadi diskontinuitas. Masyarakat juga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan budaya sekolah yang semakin relevan untuk diperjuangkan oleh karena berbagai tantangan yang semakin mereduksi nilai-nilai kearifan lokal.

Kewenangan-kewenangan masyarakat, orang tua dalam upaya peningkatan mutu sekolah merupakan konsekuensi diterapkannya undang-undang otonomi daerah, otonomi sekolah hingga otonomi pendidik, guru dalam mengelola sekolah atau kelasnya. Undang-undang otonomi daerah yang memungkinkan terjadinya desentralisasi, memberi kewenangan (to give authority to) merupakan sebuah tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Paradigma pendidikan yang desentralisasi ini mengindikasikan peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sekolah atau lembaga peningkatan mutu yang berkaitan dengan pendidikan. Implikasi kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam masyarakat yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat memiliki karakteristik:

1. Mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan dan peradaban.
2. Mendukung diseminasi nilai keunggulan.
3. Mengembangkan nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan dan keagamaan.
4. Mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai moral.

Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya, kearifan lokal diperlakukan oleh karena alasan-alasan berikut:

1. Kebermaknaan (meaningfull learning) dan kebermanfaatannya bagi peserta didik.
2. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran.
3. Materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.
4. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran ada kesesuaian kebutuhan peserta didik.
5. Menekankan pembelajaran partisipatif → peserta didik sebagai pusat (student centre learning).
6. Menumbuhkan kerja sama di antara peserta didik.
7. Menumbuhkan kemandirian.

Problematikan Modernisasi dan Enkulturasasi Pendidikan Islam

Modernisasi akrab kaitannya dengan istilah *westernisasi* (Ismail, 2004: 198). Westernisasi merupakan perilaku meniru atau mencontoh negara Barat dari segi gaya hidup. Gaya hidup yang diikuti cenderung kepada gaya berpakaian, cara bergaul, cara bertutur kata, dan cara bersikap atau berperilaku. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bahwa modernisasi tidaklah sama dengan *westernisasi* dari sisi meniru gaya hidup orang Barat, akan tetapi modernisasi menekankan pada kesadaran individu tentang perubahan kebutuhan zaman dan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan.

Setiap perubahan memiliki dampak negatif dan positif termasuk juga modernisasi dalam pendidikan Islam. Sub ini tidak akan menguraikan tentang dampak positif modernisasi pada pendidikan Islam, justru sebaliknya dampak atau problem yang muncul yang akan menjadi fokus pembahasan pada bagian ini.

Perlu dipahami bahwa ide modernisasi berasal dari teori-teori barat, dimana mereka memiliki perbedaan yang signifikan dari aspek budaya, gaya hidup, ide, dan keyakinan. Dengan mengadopsi ide dan gagasan modernisasi maka secara tidak langsung ada akulturasi budaya dan pemikiran yang diterapkan dalam konsep pendidikan Islam. Beberapa efek negatif yang ditimbulkan meliputi (Harahap, 1998: 129):

- a. Pemiskinan nilai spiritual. Tindakan sosial yang tidak mempunyai implikasi materi (tidak produktif) dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional.
- b. Sebagian manusia terkungkung dalam dunia serba materi, yang menyebabkan nafsu hayawaniyah menjadi pemandu kehidupan.
- c. Peran agama digeser menjadi urusan akhirat sedang urusan dunia menjadi wewenang sains (skularistik).
- d. Tuhan hanya hadir dalam pikiran, dan tulisan, akan tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan.
- e. Gabungan ikatan primordial dengan sistem politik modern melahirkan nepotisme, birokratisme dan otiriterianisme.
- f. Individualistik. Keluarga pada umumnya mulai kehilangan fungsinya sebagai unit terkecil pengambil keputusan. Seseorang hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga akibatnya ikatan moral keluarga semakin melemah dan keluarga dianggap sebagai lembaga yang teramat tradisional.
- g. Terjadinya frustrasi eksistensial dengan ciri: pertama, hasrat yang berlebihan untuk berkuasa, bersenang-senang. Kedua, kehampaan eksistensial berupa perasaan serba hampa, tak berarti hidupnya. Ketiga, neurosis noogenik, perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, tak mempunyai tujuan dan sebagainya.
- h. Terjadinya ketegangan-ketegangan, informasi di kota dan di desa, kaya dan miskin, konsumeris, dan kekurangan

Aspek-aspek negatif dari modernisasi ini selanjutnya menjadi tantangan pendidikan Islam dimasa sekarang dan akan datang. hal ini mengingatkan bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, seluruh proses dinamika serta perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kekejaman globalisasi menjadi tanggung jawab sekaligus lahan garapan bagi pendidikan Islam. Cukup berat tugas dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam.

Pendidikan Islam kedepan harus dapat membenahi problematika yang muncul dari modernisasi. Beberapa problem yang perlu dibenahi kedepan adalah *pertama*; corak pendidikan Islam yang lebih bersifat materialistik dan skularistik. Pendidikan materialistik merupakan buah dari gaya hidup masyarakat yang cenderung skularistik. Sehingga hal pertama yang menjadi pertanyaan orang tua siswa atau siswa, adalah apakah lembaga pendidikan tempat ia belajar dapat menjamin kehidupannya? Demikian juga dengan kurikulumnya lebih mengarah pada bagaimana hal-hal yang materialistik itu dapat di capai,

dalam hal ini belajar lebih terfokus pada aspek penguasaan ilmu (kognitif) belaka ketimbang bagaimana seseorang siswa memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. **Kedua**; privatisasi pendidikan. Hal ini dianggap menyengsarakan rakyat karena subsidi pemerintah menjadi berkurang sehingga biaya pendidikan akan mengalami pembengkakan. Selain itu pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, maka muncul kapitalisme pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis dan mesin pengeruk uang. Selain kedua hal di atas masih banyak lagi problem pendidikan yang muncul sebagai akibat gelombang globalisasi yang begitu deras (Rijal, 2018).

Selain itu, dalam merespon arus globalisasi pendidikan Islam memiliki beberapa tantangan serta masalah. Yaitu; **pertama**, format pendidikan yang harus dipilih dan dilaksanakan. Kini dalam menghadapi globalisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan dalam memilih serta melaksanakan format pendidikan yang ideal serta sesuai baginya. Apakah harus memilih pendidikan pesantren yang bercorak tradisional (salaf), ataukah format pendidikan modern dengan sistem boarding school sebagaimana yang marak saat ini. Kedua sistem ini nyatanya masih menyisakan kekurangan-kekurangan yang menuntut perbaikan disana-sini. Oleh sebab itu format pendidikan menjadi tantangan tersendiri pendidikan Islam.

Kedua, persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam. UU pendidikan yang memberikan pengakuan serta penyetaraan pendidikan terhadap lembaga pendidikan Islam telah membuka peluang bagi terselenggaranya berbagai jenis pendidikan Islam. Namun yang menjadi permasalahan pengambilan pilihan-pilainya tadi bisa jadi dapat mengorbankan identitas pendidikan Islam itu sendiri. telah terjadi benturan antara social expectations dengan academic expectation. Misalnya pesantren yang di dalamnya telah masuk program-program non kependidikan seperti koperasi, pengembangan teknologi, pengembangan HAM dan demokrasi. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menggerus identitas pesantren itu sendiri.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan manajemen. Sejalan dengan arus globalisasi ini pendidikan Islam dituntut untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya. Pendidikan Islam haruslah bertitik tolak pada prinsip kemandirian, profesionalitas, serta kredibilitas-akuntabilitas. Guna mencapai semua ini maka konsep-konsep manajemen modern haruslah segera diterapkan oleh pendidikan Islam terutama pesantren-pesantren (Burhanuddin, 2006: 12-16).

Tiga hal di atas perlu menjadi renungan para akademisi, khususnya yang bergelut dalam pendidikan Islam agar dapat diupayakan untuk dicarikan solusinya. Harapannya kedepan pendidikan Islam dapat mengulangi masa-masa emas kejayaannya para pendahulunya, agar tidak lagi selalu terlena dengan kejayaan masa lampau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada dua hal yang sulit untuk dihindari bahkan menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada era globalisasi, yaitu modernisasi dan enkulturasi budaya. Dua hal tersebut secara perlahan akan masuk pada setiap aspek kehidupan tak terkecuali dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang memiliki sistem, konsep dan nilai-nilai budaya sendiri yang bersumber dari Quran dan Hadits selayaknya dapat menyesuaikan perkembangan zaman karena sejatinya pendidikan islam memiliki konsep “Shólihun fí kulli zamánin wa makánin wa ummah”, yaitu prinsip sesuai dengan kondisi zaman, tempat dan masyarakat. Modernisasi pendidikan Islam diperlukan dalam dua aspek yaitu: kurikulum dan metodologi. Modernisasi kurikulum berfokus pada klasifikasi dan integrasi keilmuan antara keagamaan dan sains sesuai dengan tiap jenjang sedangkan metodologi berfokus pada metoda ajar dan penyampaian ilmu-ilmu keagamaan dengan prinsip *active learning*. Enkulturasi budaya pendidikan Islam terutama di Indonesia, memiliki kajian yang menarik, disatu sisi

terpengaruh oleh *weternisasi* dan di sisi lain terpengaruh oleh arabisasi. Dengan dua paradigma pandangan itu, pendidikan Islam Indonesia membuat “culture” Islam sendiri yang mengusung ke-Indonesiaan dengan internalisasi nilai-nilai Islam namun juga disaat yang bersamaan memiliki nilai budaya Timur-Tengah sebagai sumber dari Islam itu sendiri dan budaya Barat sebagai pusat modernism.

Saran

Jelaslah dari hasil kajian di atas bahwa dalam modernisasi dan enkulturasi budaya pendidikan Islam di Indonesia harus memiliki rumusan asli tentang ke-Indonesiaan sehingga dalam menerapkan modernisasi pendidikan Islam yang berciri khas Indonesia harus jelas. Sehingga dalam kaitannya pembudayaan pendidikan Islam di sekolah, Madrasah dan Pesantren telah memiliki rumusan Pendidikan Islam dengan kultur budaya Indonesia. Selain itu, Pendidikan Islam perlu sekali lagi merumuskan bagaimana Islam yang berciri khas Indonesia sehingga dalam penerapan dan pembudayaan di sekolah lebih berorientasi pada kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. In *In Deppublish: Yogyakarta*.
- Anshari, Endang Saifuddin. (2004) Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan sistem Islam. Jakarta: Gema Insani
- Arfin, Zainal. 2013. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asari, Hasan. (2007). Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan, Kajian tentang Perkembangan Modern di Dunia Islam. Bandung: Citapustaka Media
- Ashraf, Syed Ali. (1985) New Horizons in Muslim Education. Cambridge: Hodder & Stoughton.
- Azra, A. (1990). Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Logos.
- Banks, J.A., Banks, & McGee, C. A. (1989). Multicultural education. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Battelle for Kids. (2019). P21 Partnership for 21st Century Learning. Battelle for Kids. <http://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources>
- Cruz, A. P. S. (2013). Metode penelitian dan pengembangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Damen, L. (1987). Culture Learning: The Fifth Dimension on the Language Classroom. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2016). Shaping School Culture. Jossey-Bass.
- Echols, John. M. dan Shadily, Hasan. (2005). Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesia Dictionary. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, Malik. (1998). Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan
- Gazalba, Sidi. (1973). Modernisasi dalam Persoalan, Bagaimana Sikap Islam Jakarta: Bulan Bintang.
- Goleman, Daniel. 1999. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gwynne, R. N. (2009). Modernization Theory. *International Encyclopedia of Human Geography*, 7, 163–167. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102295.10107-6>
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Illahi, Sailah. 2008. Pengembangan Soft Skills di Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- Ismail. (2004). *Paradigma Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Kemdikbud, B. B. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kamus Online. <https://kbbi.web.id/Pembudayaan>
- Madjid, Nurcholish. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- _____. (2005). *Islam doktrin dan peradaban: sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Malik, R. S. (2018). Educational Challenges in 21st Century and Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development Education and Research*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.17509/jsder.v2i1.12266>
- Militzer, D. (2021). *Partnership for 21st Century Skills*. California Department of Education. <https://www.cde.ca.gov/eo/in/cr/p21cskls.asp>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. (2003). *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nurcholis, Nurchalish. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results COMBINED EXECUTIVE SUMMARIES VOLUME I, II & III*. In *PISA 2009 at a Glance: Vol. I*. <https://doi.org/10.1787/g222d18af-en>
- Pajak EF. Willard Waller's Sociology of Teaching Reconsidered: "What Does Teaching Do to Teachers?" *American Educational Research Journal*. 2012;49(6):1182-1213. doi:10.3102/0002831212444591
- Pappas, S. (2021). What is Culture? *Live Science*. <https://www.livescience.com/21478-what-is-culture-definition-of-culture.html>
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Akhsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi saw Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Smith, Vernon. (1999). "Pendidikan Tradisional", dalam Paulo Freire, dkk, *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholihan. (2008). *Modernistas Posmodernitas dan Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, CV.
- Supriyatno, H. (2020). *Tazkia Pesantren Elit Besutan Alumnus UMM Kota Malang*. *Harian Bhirawa*. <https://www.harianbhirawa.co.id/tazkia-pesantren-elit-besutan-alumnus-umm-kota-malang/>
- Suryadi, Ace. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Suwarsono, A. Y. S. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, 95–204.
- Syah, M. Noor Sulaiman. (2016). *Challenges of Islamic Education in Muslimworld: Historical, Political, and Socio-Cultural Perspective*, *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*. Volume 4, Issue 1
- Takdir, Mohammad. (2018). *Modernisasi Kurikulum Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. John Wiley & Sons, Inc. ossey-Bass.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives (Note: Imp lementierung der BNE) (Issue March)*.
- United Nations. (2020). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nation. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi*. LKiS.
- Waller, W. (1976). *The sociology of teaching*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global [The transformation of 21st century education as a demand for human resource development in the global era]. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016*, 1, 263–278.
- World Economic Forum. (2016). *New Vision for Education : Fostering Social and Emotional Learning through Technology*. In *World Economic Forum (Issue March)*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf